



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIFIN
2. Jabatan : KEPALA SATPOL PP
3. NHK : 45001

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 23.700.000.000

1. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 480.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/800 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/23 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/90 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
9. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 587.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000



2. MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. MOBIL, HONDA HONDA CRV RM3 2WD2 4AT CKD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 233.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 667.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 25.154.200.000

III. HUTANG Rp. 900.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 24.254.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.